



BPR ARTHA TANAH MAS



www.tanahmasbpr.co.id



bpr.atm@gmail.com



Bpr Artha Tanah Mas

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

2024

PT BPR ARTHA TANAH MAS

Jl. Telaga Mas Raya B - 12

Kota Semarang

Provinsi Jawa Tengah

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Tanah Mas

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

933536-1-LTBPRK-R-A-20241231-010201-600857-05052025122137

Periode Data

2024

User ID Petugas Pelaporan

bpr.atm@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-05-05 12:21:37



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

BAB I

PENJELASAN UMUM

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan POJK No 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah , yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- **Akuntabilitas**, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- **Responsibility** atau **Pertanggungjawaban**, yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- **Independensi**, yaitu pengelolaan BPR secara professional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- **Fairness** atau **kewajaran**, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Manajemen PT BPR Artha Tanah Mas memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan penerapan Tata Kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola sehingga BPR Artha Tanah Mas dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan .

Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 POJK Tata Kelola BPR.

Laporan penerapan tata kelola di PT BPR Artha Tanah Mas tahun 2024 disusun mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 12/SEOJK/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Dengan penerapan Tata Kelola yang Baik, BPR Artha Tanah Mas secara konsisten dan berkesinambungan didukung oleh integritas dan komitmen tinggi yang dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank, baik dari seluruh tingkatan dan jenjang organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam pelaksanaan penerapan Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR Artha Tanah Mas. Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan kunci utama bagi BPR Artha Tanah Mas dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : Rina Sulisty Utami</p> <p>NIK *) : 3374106002710001</p> <p>Jabatan : Direktur Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengurusan, pengelolaan menetapkan tujuan dan strategi BPR. b. Menerapkan Tata Kelola, fungsi manajemen risiko serta penerapan APU & PPPSPM pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. c. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan d. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai dan pelatihan g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
2	<p>Nama : Rizky Agus Nugroho</p> <p>NIK *) : 3322150908860002</p> <p>Jabatan : Direktur Bisnis</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain: b. Menghimpun dana; c. Menyalurkan kredit; d. Menempatkan dana pada bank lain; e. Menerima penempatan dana dari bank lain; f. Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris. g. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan BPR. h. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang i. Bertanggung jawab atas penyusunan dan tercapainya RBB bersama Direktur yang lain j. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko k. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. l. Bersama-sama dengan Direktur yang lain menerapkan GCG yang baik, fungsi

	manajemen risiko serta penerapan APU & PPPSPM
3	Nama : Donas Yhudisanjaya
	NIK *) : 3313122609790001
	Jabatan : Direktur Operasional dan Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan langkah - langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang - undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati - hatian. b. Memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang - undangan lain. c. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang - undangan. d. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain. e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang - undangan lain yang relevan. f. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan operasional dan IT secara profesional dan memperhatikan prinsip kehati - hatian. g. Bertanggung jawab atas pembuatan peraturan, tata tertib, dan tindakan kedisiplinan. h. Penerapan fungsi kepatuhan pada semua unit kerja dalam organisasi i. Bersama-sama dengan Direktur yang lain menerapkan GCG yang baik, fungsi manajemen risiko serta penerapan APU & PPPSPM. j. Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan edukasi, literasi dan inklusi k. Bersama- sama dengan Direktur Utama Bertanggung Jawab atas Sumber Daya Manusia dan Pelatihan l. Bertanggung jawab atas penyusunan dan tercapainya RBB bersama Direktur yang lain
	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:
	<ul style="list-style-type: none"> 1) Untuk meningkatkan tata kelola yang baik Direksi telah mendorong seluruh karyawan agar memiliki kompetensi yang cukup dalam mengelola risiko sesuai dengan tugas dan wewenangnya. 2) Agar BPR dapat berkompetisi secara sehat , Direksi sudah memastikan seluruh proses penyaluran kredit pada masyarakat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan 3) Direksi BPR Artha Tanah Mas telah meningkatkan likuiditas dengan penghimpunan dana pihak ketiga baik dalam bentuk Tabungan maupun deposito dengan peningkatan 10,6%. Peningkatan DPK ini sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan BPR Artha Tanah Mas dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan memperluas basis nasabah 4) Direksi telah melakukan pengelolaan asset produktif dengan menyalurkan kredit terhadap UMKM di Kota Semarang dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian dan juga melakukan penempatan dana kepada bak yang sehat serta mengikuti ketentuan yang berlaku,

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : Gabriella Gati Wardani

	NIK *) : 3322185309800006
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	<p>a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. <p>e. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris.</p> <p>f. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.</p>
2	Nama : Ignatius Adi Kurniawan
	NIK *) : 3374122607830001
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	<p>a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. <p>e. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris.</p> <p>f. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.</p>
	<p>Rekomendasi kepada Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berdasarkan hasil pengawasan Direksi telah berhasil merumuskan dan mengimplentasikan strategi yang tepat sasaran, Direksi perlu menyusun strategi untuk melakukan penetrasi pasar untuk memperkuat jaringan pasar 2) Dengan kondisi perekonomian baik secara lokal maupun nasional yang cenderung fluktuatif Direksi perlu menyusun strategi penguatan likuiditas dengan pengelolaan risiko yang terukur. 3) Penurunan kualitas asset di tahun 2024 berdampak pada penurunan pencapaian laba,

Direksi perlu menyusun strategi peningkatan kualitas asset, hal ini juga sebagai strategi penerapan POJK No 1 tahun 2024 tentang kualitas asset.
--

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Rina Sulisty Utami	3374106002710001	-	-
2	Rizky Agus Nugroho	3322150908860002	-	-
3	Donas Yhudisanjaya	3313122609790001		

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Rina Sulisty Utami	3374106002710001	-	-	-
2	Rizky Agus Nugroho	3322150908860002	-	-	-
3	Donas Yhudisanjaya	3313122609790001			

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Rina Sulisty Utami	3374106002710001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Rizky Agus Nugroho	3322150908860002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Donas Yhudisanjaya	3313122609790001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Rina Sulisty Utami	3374106002710001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Rizky Agus Nugroho	3322150908860002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Donas Yhudisanjaya	3313122609790001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Gabriella Gati Wardani	3322185309800006	-	-
2	Ignatius Adi Kurniawan	3374122607830001	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Gabriella Gati Wardani	3322185309800006	-	-	-
2	Ignatius Adi Kurniawan	3374122607830001	601385	PT. BPR Mekar Nugraha	7.00

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Gabriella Gati Wardani	3322185309800006	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Ignatius Adi Kurniawan	3374122607830001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Gabriella Gati Wardani	3322185309800006	Tidak Ada	Tidak Ada	- Vaulinus Bramantya – Suami - Agustina Arshanti – Saudara kandung dari suami - Paulus Agung Krismantara – saudara kandung dari suami
2	Ignatius Adi Kurniawan	3374122607830001	Tidak Ada	Tidak Ada	M Florensia Ayu Maharani- Saudara Kandung

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji *)	3	707.149.944	2	317.508.000
2	Tunjangan	0	0	0	-
3	Tantiem / Jasa Produksi	3	182.012.736	2	121.341.824
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-

5	Remunerasi lainnya **)	-	-	-
Total			889.162.680	438.849.824

- Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	Mobil Operasional (3 unit)	-
3	Asuransi Kesehatan	Asuransi Kesehatan Internal untuk direksi dan keluarga (sebesar Rp 68.634.050/tahun)	Asuransi Kesehatan Internal untuk Dewan Komisaris dan keluarga (sebesar Rp. 27.667.860 per tahun)
4	Fasilitas Lainnya *)	-	-

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	:
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,40	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,50	: 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,17	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,75	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	5,07	: 1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	02-01-2024	2	Rencana strategi tahun 2024
2	05-02-2024	2	Persiapan RUPS tahun buku 2023
3	02-05-2024	2	Rencana pengembangan SDM dan starategi pengembangan pasar
4	22- 08-2024	2	Rencana pengangkatan Direktur Kepatuhan
5	01-09-2024	2	Rekomendasi Hasil Temuan Internal Audit
6	11-11-2024	2	Evaluasi pencapaian kinerja 2024 Year to Year posisi oktober dan tentang RBB tahun 2025

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Gabriella Gati Wardani	3322185309800006	6	-	100
2	Ignatius Adi	3374122607830001	6	-	100

Kurniawan				
-----------	--	--	--	--

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal* (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh								
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap		
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Nihil
Telah Diselesaikan		nihil		nihil		nihil			Nihil
Dalam proses penyelesaian**)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya***)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		nihil		nihil		nihil			Nihil

J. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	Nihil
Dalam proses penyelesaian	1	Nihil
Total	2	Nihil

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK	Jumlah Dana (Rp)
1	18/01/2023	Sosial	Uang duka untuk lelayu Bp Suparman	Keluarga Bp Suparman	-	197.000
2	07/03/2024	Sosial	Biaya Donasi Paskah untuk Gereja Katolik Santo Paulus Sampangan	Panitia Paskah Gereja Katolik Santo Paulus Sampangan	-	750.000
3	11/03/2024	Sosial	Sumbangan orang tua nasabah an Ibu	Keluarga Ibu Sri Soemanti	-	500.000

			sri Soemanti			
4	15/03/2024	Sosial	Sumbangan makanan utk korban banjir di Semarang Utara	Kelurahan Semarang Utara	-	1.200.000
5	15/03/2024	Sosial	Sumbangan makanan utk korban banjir di Semarang Utara	Kecamatan Semarang Utara	-	1.125.000
6	08/07/2024	Sosial	Sumbangan Memperingati HUT Kemerdekaan RI RW 01 Kel Panggung Lor	Panitia HUT RI RW 01 Kel. Panggung Lor	-	300.000
7	22/07/2024	Sosial	Biaya sumbangan ulang tahun Yayasan Soegijopranoto	Panitia Yayasan Soegijopranoto	-	444.500
8	23/07/2024	Sosial	Biaya sumbangan partisipasi kegiatan HUT Kemerdekaan kelurahan panggung lor	Panitia HUT Kelurahan Panggung Lor	-	500.000
9	16/08/2024	Sosial	Sumbangan Memperingati HUT Kemerdekaan RT 05 RW 10 Kelurahan Ngaliyan	Panitia HUT RI RT 05 RW 10 Ngaliyan	-	250.000
10	16/08/2024	Sosial	Sumbangan Memperingati HUT Kemerdekaan RT 04 RW 05 Kelurahan Sampangan	Panitia HUT RI RT 04 RW 15 Sampangan	-	250.000
11	16/08/2024	Sosial	Biaya untuk kegiatan 17 Agustus RW01 Kel.Panggung Lor	Panitia HUT RI RW 01 Kelurahan Panggung Lor	-	250.000
12	19/08/2024	Sosial	Biaya untuk beli souvenir 17agustusan Pasar Selo	Sudjono	-	693.000
13	03/09/2024	Sosial	Biaya sponsorship Yayasan Jantung Indonesia cab utama Jateng	Yayasan Jantung Indonesia cab utama Jateng	-	500.000
14	25/09/2024	Sosial	Biaya sumbangan BPR ATM utk pelaksanaan	Panita Ekaristi Gereja Santo Ignatius	-	2.000.000

			ekaristi Gereja Santo Ignatius Semarang			
15	04/11/2024	Sosial	Biaya sumbangan pembangunan Masjid AL Muttaqin	Panitia Pembangunan Masjid Al Muttaqin	-	2.000.000

M. KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

Hasil Self Asessment penerapan Tata Kelola tahun 2024 secara umum **Nilai Komposit Tata Kelola sebesar 1 dengan predikat "Sangat Baik"**, dalam pelaksanaan Good Corporate Governance yang baik dan berkesinambungan diseluruh bagian atau unit kerja BPR Artha Tanah Mas, maka akan diperoleh :

1. Dengan diterbitkannya SOP Tata Kelola PT Artha Tanah Mas dan diikuti dengan pelaksanaan / implementasi yang konsisten dan berkelanjutan diseluruh tingkatan, bagian di dalam BPR akan menghasilkan tata Kelola yang berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan berlaku
2. Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, maka Dewan Komisaris dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif
3. Fungsi Kepatuhan , Fungsi Audit intern dan Fungsi Audit Eksternal akan berjalan sesuai dengan ketentuan Good Corporate Governance (GCG)

BPR telah menerapkan pelaksanaan tata kelola secara umum dengan Sangat Baik. Hal tersebut tercermin dari pemenuhan masing-masing aspek atas prinsip tata kelola sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal terdapat kelemahan terhadap pelaksanaan tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak memberikan dampak signifikan dan bank masih dapat mengelola kelemahan tersebut

Semarang, 24 April 2025
PT. BPR ARTHA TANAH MAS



Rina Sulistyawati
 Direktur Utama



Gabriella Gati Wardani
 Komisaris Utama